

**RINGKASAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PROTOTYPE LINGKUNGAN SOSIAL YANG BERPOTENSI
MEMUNCULKAN BENCANA RUANG KOTA
(STUDI KASUS KOTA SOLO)**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor Kontrak: 316/SP2H/PP/DP2M/IV/2010, Tertanggal 12 April 2010

Disusun oleh:

**Ir. Qomarun, M.M.
Dr. Ir. Arya Ronald
Dr. Moordiningsih, S.Psi., M.Psi.
Ronim Azizah, S.T., M.T.**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
OKTOBER 2010**

1. Kompilasi Data

Berbeda dengan tahap penelitian pertama yang mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen kuno, maka pada tahap penelitian kedua ini (Hibah Bersaing 2010) dilakukan melalui kasus-kasus nyata di lapangan (*field research*). Sebagai suatu langkah penelitian yang berparadigma rasionalistik, maka teknik pengumpulan data yang berupa budaya hipokratik, yaitu kebiasaan berperilaku munafik, bermuka dua, berbohong, berkhianat ataupun beringkar janji, dilakukan melalui metode observasi dan investigasi. Peneliti dalam melakukan penelitian didesain justru menyatu dengan kasus lapangan, yaitu dengan menjadi masyarakat biasa dan berperilaku seadanya, sehingga pihak yang diteliti tidak merasa atau tidak tahu kalau sedang diteliti. Hal ini terkait dengan obyek penelitian yang berupa tindakan-tindakan yang bernilai negatif, seperti korupsi, suap, berbohong dan melanggar aturan. Kompilasi data telah dilakukan pada lima kawasan yang berkategori sebagai simbol-simbol aktifitasnya, yaitu: (1) lingkungan pemerintahan; (2) lingkungan pendidikan; (3) lingkungan kepolisian; (4) lingkungan permukiman; dan (5) lingkungan taman kota. Untuk mendapatkan data penelitian yang valid, proses penelitian yang obyektif dan hasil penelitian yang kredibel, maka penelitian ini mengumpulkan data-data hingga 15 lokasi.

2. Analisa-Sintesa Data

Untuk menggali perilaku budaya hipokratik di lingkungan pemerintahan, maka dilakukan observasi dan investigasi melalui proses mengurus tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Uji ini akhirnya berhasil melibatkan unsur pemerintahan dari tingkat terendah hingga tertinggi, yaitu kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Pemerintah Kota Surakarta dengan programnya yang berjudul: “Berseri Tanpa Korupsi” telah dipajang di tempat-tempat umum, seperti di kantor-kantor pemerintahan, halte-halte bis kota, taman-taman kota dan kios-kios resmi kota. Namun setelah lebih dari satu dasawarsa, budaya korupsi/suap masih ditemukan pada level kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Pelayanan satu atap yang diprogramkan ternyata masih bisa bocor dan bahkan ada pihak-pihak yang sengaja menawarkan jalan pintas.

Untuk menggali perilaku masyarakat di lingkungan pendidikan, maka dilakukan observasi dan investigasi pada kawasan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas di tiga lokasi yang berbeda, yaitu: (1) SMU Regina Pacis-Ursulin di Jl. Adisucipto; (2) SMPN 1 Surakarta di Jl. MT Haryono dan (3) SDN Cemara Dua di Jl. Monginsidi. Pada kasus ini, peneliti melakukan observasi tentang larangan parkir di jalan raya dekat kawasan itu pada jam 06.30-07.30 dan jam 11.30-13.30. Kondisi di lapangan pada masing-masing lokasi mempunyai keadaan yang sama, yaitu tidak ada yang patuh alias melanggar peraturan yang telah mereka buat sendiri melalui wakil-wakilnya di DPRD atau pimpinannya di Balaikota. Pada kasus di SMU Regina Pacis-Ursulin lebih buruk lagi, yaitu tanda lalu lintas dilarang parkir justru dibuang dan dihilangkan. Saat ini kondisi parkir di lokasi yang dilarang parkir itu tidak hanya satu baris kendaraan, melainkan dua baris dan bahkan di seberang jalan juga sudah mulai digunakan sebagai arena parkir.

Untuk menggali perilaku aparat kepolisian tentang budaya hipokratik, maka dilakukan uji tentang mengurus surat-surat berkendara (SIM, STNK,

BPKB) dan observasi penegakan hukum di jalan raya oleh Polantas. Isu budaya ‘nembak’ saat mengurus SIM di lingkungan kepolisian terbukti masih ada ketika peneliti terjun ke lapangan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi pengumuman-pengumuman ataupun himbauan yang terpasang di beberapa tempat di kantor yang sama. Sementara itu, terkait mengurus tentang surat-surat kendaraan, seperti STNK dan BPKB, yang dilakukan oleh pihak jasa-jasa tertentu (‘calo’), juga masih dapat ditemui ketika peneliti terjun di lapangan, yaitu pada kantor pelayanan satu atap di Samsat.

Untuk menggali perilaku masyarakat di lingkungan permukiman, maka dilakukan observasi tentang lahir dan berkembangnya PKL di jalan-jalan dekat permukiman. Pada umumnya, kawasan permukiman adalah kawasan yang menjadi harapan untuk tempat istirahat yang nyaman, tenang dan tentram. Kasus di Kampung Manahan adalah dapat menjadi preseden tentang budaya hipokratik bagi masyarakat umum di tempat-tempat yang lain. Semula PKL di tempat yang menjadi pintu gerbang kampung dilarang oleh beberapa warga, karena selain jalan menjadi sempit maka juga lokasi menjadi kumuh. Namun, ketika ada pihak-pihak yang mengancam terkait ‘masalah nyawa’ bagi pihak yang melarang dan ‘isi perut’ bagi pihak yang mengizinkan, maka PKL dapat terjadi. Musyawarah tingkat RT dan RW justru melegalkan tindakan ilegal. Jadi budaya hipokratik (munafik) sudah merambah kepada lingkungan perumahan-perumahan.

Untuk menggali perilaku masyarakat di lingkungan taman kota, maka dilakukan observasi di kawasan hijau kota di Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Anyar dan DAS Kali Tanggul. Kawasan sungai adalah paru-paru kota dan menjadi area publik yang menyenangkan. Namun, seiring dengan banyaknya pemukiman liar dan polusi air, maka kawasan itu menjadi sampah raksasa bagi ruang kota. Peneliti menemukan hal yang sama di tiga lokasi itu, yaitu daerah DAS menjadi area pemukiman liar yang panjang dan berlapis-lapis. Peraturan yang dipasang permanen dan diletakkan di berbagai tempat, hanya menjadi tugu saja dan tidak ada respon atau tanggapan bagi pihak yang berkuasa. Kawasan itu seharusnya menjadi milik bersama seluruh warga kota, tetapi kenyataannya lahan itu telah menjadi milik pribadi dari beberapa warga kota. Jadi budaya hipokratik (munafik) sudah merambah di lokasi-lokasi taman kota dan tempat-tempat publik lainnya.

3. Temuan Penelitian

Berdasarkan 5 kasus penelitian dari 15 lokasi yang berbeda di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya hipokratik telah subur dan mengakar di masyarakat Kota Solo. Pihak *stake holder* ruang kota (pemerintah dan warga masyarakat) saling berpura-pura, saling melanggar, saling ingkar atau saling bermuka-dua, yang pada gilirannya telah mampu menciptakan konflik laten. Budaya hipokratik selalu terkait dengan peraturan tertulis (seperti: undang-undang, surat keputusan, regulasi) maupun yang tidak tertulis (seperti: norma-norma, adab sopan-santun, mufakat masyarakat). Penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang tertulis telah dilanggar secara massal, sehingga hal-hal yang tidak tertulis tentu lebih buruk kondisinya. Sangsi, hukuman, denda ataupun hal-hal lain yang ada dalam peraturan tidak membuat takut bagi para *stake holder* untuk melanggarnya.